



Pengadilan Agama
Banggai

2021

LAPORAN KEUANGAN

CALK Periode 31 Desember 2021

JL. KI HAJAR DEWANTARA

Kec. Banggai, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah

TELP/FAX : 0462-21544

Email : pa.banggai@yahoo.co.id

Pengadilan Agama Banggai

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021



Jl. Ki Hajar Dewantara No. 1,

Banggai – Banggai Laut 94791

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Banggai adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Banggai mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Agama Banggai. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).



Banggai, 31 Desember 2021
Kuasa Pengguna Anggaran,

Sabrin, S.Ag.
NIP.19731005 200212 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	1
Ringkasan	2
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	17
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	24
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	38
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	44
F. Pengungkapan Penting Lainnya	48
VI. Lampiran dan Daftar	49

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Banggai yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan TA. 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Banggai, 31 Desember 2021
Tuasa Pengguna Anggaran,

Sabrin, S.Ag.
NIP. 19731005 200212 1 005

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Banggai Tahunan TA. 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahunan TA. 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 1.195.689,- atau mencapai 75.01 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.594.000,-.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp 2.555.012.873,- atau mencapai 98,77 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 2.586.734.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021. Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp 2.882.714.185,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 1.406.388,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp 0,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 2.878.200.797,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 3.107.000,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 2.876.493.275 per 31 Desember 2021,- dan Rp 3.050.494.294 per 31 Desember 2020,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 1.195.686,-, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp 2.729.371.101,- sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp (2.728.175.415) ,-. Surplus Kegiatan Non Operasional dan surplus Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 0,- dan sebesar Rp 0,- sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar Rp (2.728.175.415),-.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 3.050.494.294,- dikurangi defisit-LO sebesar Rp (2.728.175.415),- ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp 0,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 2.554.174.396,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp 2.876.493.275,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun Anggaran 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN AGAMA BANGGAI LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TAHUN ANGGARAN 2021 DAN TAHUN ANGGARAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA. 2021		% thd Angg	TA. 2020
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	B.1				
Pendapatan PNPB		1,594,000	1.195.686	75,0 1	2.532.826
JUMLAH PENDAPATAN		1.594.000	1.195.686	75,0 1	2.532.826
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	1.713.734.000	1.692.909.216	98,8 0	1.686.391.963
Belanja Barang	B.4	835.803.000	824.603.657	98,6 6	781.501.006
Belanja Modal	B.5	37.500,000	37.500,000	100	350.000.000
Belanda Bantuan Sosial	B.6	0	0	0,0 0	
JUMLAH BELANJA		2.586.734.000	2.555.012.873	98,7 7	2.867.859.000

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

PENGADILAN AGAMA BANGGAI NERACA PER 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan	C.3	0	0
Piutang Bukan Pajak	C.4	0	0
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	0	0
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	0	0
Belanja Dibayar di Muka	C.8	1.394.388	0
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	0	0
Persediaan	C.10	12.000	2.283.500
Jumlah Aset Lancar		1.406.388	2.283.500
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	0	0
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	0	0
Jumlah Piutang Jangka Panjang		0	0
ASET TETAP			
Tanah	C.14	379.284.415	379.284.415
Peralatan dan Mesin	C.15	1.234.055.807	1.457.515.807
Gedung dan Bangunan	C.16	2.427.357.000	2.427.357.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.18	2.429.979	2.072.770
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(1.164.926.404)	(1.219.724.588)
Jumlah Aset Tetap		2.878.200.797	3.046.505.404
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	16.850.000	16.850.000
Aset Lain-Lain	C.22	452.711.500	191.751.500
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(466.454.500)	(202.682.700)
Jumlah Aset Lainnya		3.107.000	5.918.800
JUMLAH ASET		2.882.714.185	3.054.707.704
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	25.000.000	0
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	6.220.910	4.213.410
Pendapatan Diterima Dimuka	C.26	0	0
Beban Yang Masih Harus Dibayar	C.27	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		6.220.910	4.213.410
JUMLAH KEWAJIBAN		6.220.910	4.213.410
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	2.876.493.275	3.050.494.294
JUMLAH EKUITAS		2.876.493.275	3.050.494.294
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.876.493.275	3.050.494.294

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN AGAMA BANGGAI LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2021 DAN 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA. 2021	TA. 2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	1.195.686	1.195.686
JUMLAH PENDAPATAN		1.195.686	1.195.686
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	1.695.271.216	1.689.457.963
Beban Persediaan	D.3	14.902.500	22.775.000
Beban Barang dan Jasa	D.4	553.162.712	481.155.353
Beban Pemeliharaan	D.5	181.961.057	174.890.911
Beban Perjalanan Dinas	D.6	75.100.000	103.214.242
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D.8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	208.973.616	203.990.005
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	0	0
JUMLAH BEBAN		2.729.371.101	2.675.483.474
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(2.728.175.415)	(2.672.950.648)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0	0
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		0	0
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan Luar Biasa		0	0
Beban Luar Biasa		0	0
SURPLUS/DEFISIT LO		(2.728.175.415)	(2.672.950.648)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN AGAMA BANGGAI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020
EKUITAS AWAL	E.1	3.050.494.294	2.223.601.387
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(2.728.175.415)	(2.672.950.648)
KOREKSI YANG	E.3	0	684.483.412
MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN		0	0
KEBIJAKAN/			
KESALAHAN MENDASAR			
Penyesuaian Nilai Aset	E.3.1	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.2	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.3	722.342.000	(722.342.000)
Koreksi Nilai Aset Tetap Non	E.3.4	(37.858.588)	37.858.588
Revaluasi			
Koreksi Nilai Lain-Lain	E.3.5	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	2.554.174.396	2.815.360.143
Ditagihkan ke Entitas Lain	E.4.1	2.555.012.873	2.817.892.969
Diterima Dari Entitas Lain	E.4.2	(1.195.686)	(2.532.826)
Transfer Keluar	E.4.3	0	0
Transfer Masuk	E.4.4	357.209	0
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(174.001.019)	826.892.907
EKUITAS AKHIR	E.5	2.876.493.275	3.050.494.294

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Banggai

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis Pengadilan Agama Banggai didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Entitas berkedudukan di Jalan Ki Hajar Dewantara No.1, Banggai Laut, Sulawesi Tengah.

Pengadilan Agama Banggai mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Pengadilan Agama Banggai berkomitmen dengan visi “*Terwujudnya Pengadilan Agama Banggai sebagai Lembaga Peradilan Tingkat Pertama Yang Agung dan Berwibawa.*” Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

- Meningkatkan penyelesaian perkara.
- Meningkatkan aksesibilitas putusan hakim yang berkualitas.
- Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).
- Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- Meningkatkan kualitas pengawasan.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahunan TA. 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Banggai. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis

Akuntansi

Basis Akuntansi

Pengadilan Agama Banggai menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Banggai dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Banggai. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Banggai adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan- LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah :

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d.tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang	
	Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin

berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan

Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun

Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4

Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban

dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pengadilan Agama Banggai telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2021	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan PNPB	1.594.000	1.195.686
Jumlah Pendapatan	1,594,000	1.195.686
Belanja		
Belanja Pegawai	4.164.931.000	1.713.431.000
Belanja Barang	773.631.000	830.803.000
Belanja Modal	37.500.000	37.500.000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	4.981.062.000	2.586.734.000

Realisasi

Pendapatan

Rp1.195.686,-

Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 1.195.686,- atau mencapai 75.01 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.594.000,-. Rincian pendapatan Pengadilan Agama Banggai dapat dilihat sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31 Desember 2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.594.000	1.195.686	75.01
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	0.00
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	0	0	0.00
Pendapatan Denda	0	0	0.00
Pendapatan Lain-Lain	0	0	0.00
Jumlah	1.594.000	1.195.686	75.01

Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2021 adalah 75.01 persen, mengalami penurunan dibandingkan 31 Desember 2020 yaitu mencapai 158,90 persen yang dapat dirinci sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA. 2021 dan TA 2020

Uraian	TA. 2021	TA. 2020	% Naik (Turun)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.195.686	2.532.826	0,00
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	0	0	0,00
Pendapatan Denda	0	0	0,00
Pendapatan Lain-Lain	0	0	0,00
Jumlah	1.195.686	2.532.826	0,00

Realisasi Belanja
Negara
Rp2.555.012.873,
-

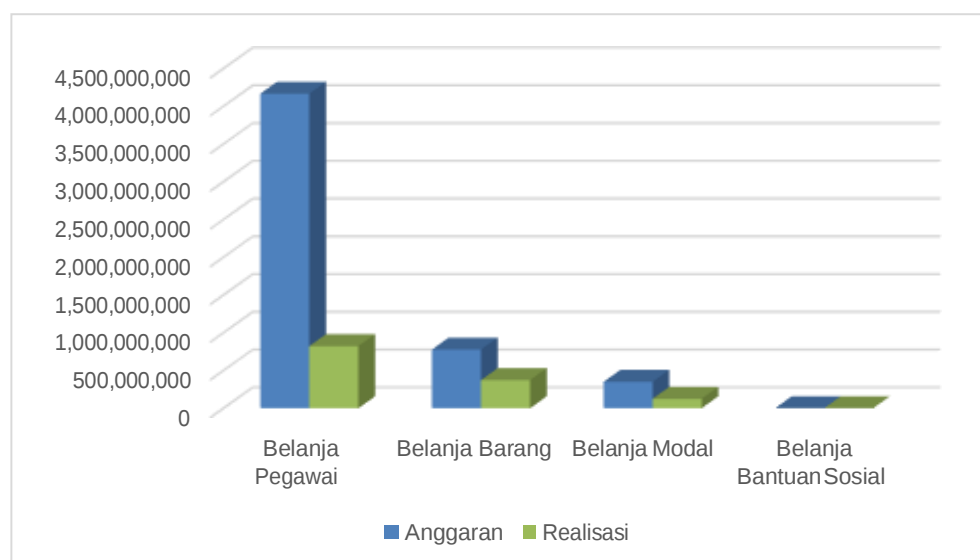
Belanja

Realisasi Belanja instansi pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp 2.555.012.873,- atau 98,80% dari anggaran belanja sebesar Rp 2.586.734.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021

Uraian	Tahun Anggaran 2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	1.713.431.000	1.692.909.216	98,80
Belanja Barang	835.803.000	824.603.657	98,66
Belanja Modal	37.500.000	37.500.000	100,00
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00
Jumlah	2.586.734.000	2.555.012.873	98,80

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan TA 2020, Realisasi Belanja TA 2021 mengalami penurunan – 10,28% dibandingkan realisasi belanja pada TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Pengadaan belanja modal untuk mendukung rencana strategis yang dimulai pada TA. 2021,

Perbandingan Realisasi Belanja TA. 2021 dan TA 2020

URAIAN	TA . 2021	TA. 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	1.692.909.216	1.686.391.963	0,38
Belanja Barang	824.603.657	781.501.006	5,22
Belanja Modal	37.500.000	350.000.000	(833)
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0.00
Jumlah	2.555.012.873	2.817.892.969	(10,28)

Belanja Pegawai

Rp1.692.909.216

,-

Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 1.692.909.216,- dan Rp 1.686.391.963,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,38 persen dari TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya pengurangan pegawai dalam rangka promosi mutasi mendukung program maupun kegiatan dalam beberapa tahun mendatang.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2021 dan TA 2020

URAIAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.692.909.216	1.686.391.963	0,38
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	0	0	0.00
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	0	0	0.00
Belanja Lembur	0	0	0.00
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	1.692.909.216	1.686.391.963	0,38
Pengembalian Belanja Pegawai	0	0	0
Jumlah Belanja	1.692.909.216	1.686.391.963	0,38

Belanja Barang

Rp 819.618.657,-

Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 819.618.657,- dan Rp 781.501.006,-. Realisasi Belanja Barang T.A 2021 mengalami kenaikan sebesar 4,56 % dari Realisasi Belanja Barang TA. 2020. Hal ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya belanja pemeliharaan dan belanja barang operasional sepanjang TA 2020.

Perbandingan Belanja Barang TA 2021 dan TA 2020

URAIAN	Tahun Anggaran 2021	Tahun Anggaran 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	468.609.500	0	0
Belanja Barang Non Operasional	0	0	0
Belanja Barang Persediaan	12.631.000	0	0
Belanja Jasa	81.317.100	0	0
Belanja Pemeliharaan	181.961.057	0	0
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	75.100.000	0	0
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	0	0	0
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	819.618.657	781.501.006	4,56
Pengembalian Belanja	0	0	0
Jumlah Belanja	819.618.657	781.501.006	4,56

Belanja Modal

Belanja Modal

Rp 37.500.000,-

Realisasi Belanja Modal TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 37.500.000,- dan Rp 350.000.000,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2021 mengalami penurunan

Dibandingkan TA. 2020 disebabkan oleh anggaran belanja modal untuk TA 2021 lebih kecil daripada TA 2020.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2021 dan TA 2019

URAIAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.500.000	0	0.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	350.000.000	0.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0.00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	37.500.000	350.000.000	0.00
Pengembalian	0	0	0.00
Jumlah Belanja	37.500.000	350.000.000	(833)

Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Realisasi tersebut pada TA 2021 tidak mengalami perubahan dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan oleh karena tidak tersedianya anggaran belanja modal tanah selama TA 2021 dan TA 2020.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2021 dan TA 2020

URAIAN JENIS BELANJA	TA 2021	TA. 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pembebasan Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0.00
Jumlah Belanja	0	0	0.00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 adalah sebesar Rp 37.500.000,-, bila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp 0,-. Hal ini

disebabkan oleh tidak ada pengadaan barang pada peralatan dan mesin tahun 2020.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan
Mesin TA 2021 dan
TA 2020*

URAIAN	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun) %
Komputer Unit	0	0	0.00
Peralatan Komputer	37.500.000	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	37.500.000	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0.00
Jumlah Belanja	37.500.000	0	0.00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA. 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 350.000.000,-. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 mengalami penurunan dibandingkan Realisasi TA 2020. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari penambahan daya listrik dan jaringan listrik dan yang telah ada

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA
2021 dan TA 2020*

URAIAN	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun) %
Jaringan Listrik dan Tambah Daya	0	350.000.000	100.00
Jumlah Belanja Kotor	0	350.000.000	100.00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0.00
Jumlah Belanja	0	350.000.000	(100.00)

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp0,-. Realisasi Belanja Modal TA 2021 tidak mengalami perubahan dibandingkan Realisasi TA 2020.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2021 dan
TA 2020*

URAIAN	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	0	0	0.00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0		0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0.00
Jumlah Belanja	0	0	0.00

Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2021 tidak mengalami perubahan dibandingkan Realisasi TA 2020.

*Belanja
Bantuan
Sosial
Rp 0,-*

Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Tidak terdapat Belanja Sosial pada Pengadilan Agama Banggai.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2021 dan TA 2020

URAIAN	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun) %
Kelompok Pendidikan Jaya Maju	0	0	0.00
Kelompok Pendidikan Cenderawasih	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian	0	0	0.00
Jumlah Belanja	0	0	0.00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp
1.394.388,-

Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 1.394.388,- dan Rp 0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember
2021 dan 31 Desember 2020*

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Uang Tunai	1.394.388	0
Kuitansi UP	0	0
Bank BRI	0	0
Jumlah	1.394.388	0

Kas di Bendahara
Penerimaan Rp0,-

Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar masing-masing Rp 0,- dan Rp 0,-. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan 31 Desember 2021
dan 31 Desember 2020*

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Uang Tunai	0	0
Bank BRI	0	0
Jumlah	0	0

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih -
Piutang Perpajakan
Rp0,-

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya dari Hibah	0	0
Jumlah	0	0

Piutang PNB
Piutang PNB
Piutang PNB

Piutang PNB

Saldo Piutang PNB per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNB disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNB 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Piutang PNB	0	0
Piutang Lainnya	0	0
Jumlah	0	0

Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Tagihan TP/TGR
Tagihan TP/TGR

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut :

Rincian Bagian Lancar TP/TGR 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Nama	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	-	0	0
2	-	0	0
3	-	0	0
Jumlah		0	0

*Bagian Lancar
TPA Rp 0,-*

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Nama	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	-	0	0
2	-	0	0
3	-	0	0
Jumlah		0	0

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Lancar
Rp0,-*

Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar

31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	0	0.00%	0
Kurang Lancar	0	0.00%	0
Diragukan	0	0.00%	0
Macet	0	0.00%	0
Jumlah	0		0
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	0	0.00%	0
Kurang Lancar	0	0.00%	0
Diragukan		0.00%	0
Macet		0.00%	0
Jumlah	0		0
Bagian Lancar TPA			
Lancar	0	0.00%	0
Kurang Lancar	0	0.00%	0
Diragukan	0	0.00%	0
Macet	0	0.00%	0
Jumlah	0		0
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0		0

Belanja

Dibayar di

Muka Rp 0,-

Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Jenis	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Pembayaran Internet	0	0
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	0	0
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	0	0
Jumlah	0	0

Pendapatan yang
Masih Harus
Diterima Rp 0,-

Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Jenis	31 Desember 2021	31 Desember 2019
Pendapatan Jasa Pelatihan	0	0
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	0	0
Jumlah	0	0

Persediaan Rp
12.000,-

Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 12.000,- dan Rp 2.283.500,-.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Jenis	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Barang Konsumsi	12.000	2.283.500
Barang untuk Pemeliharaan	0	0
Suku Cadang	0	0
Persediaan Lainnya	0	0
Jumlah	12.000	2.283.500

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tagihan TP/TGR
Rp 0,-

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada

bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR 31 Desember 2021
dan 31 Desember 2020*

No	Debitur	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	-	0	0
2	-	0	0
3	-	0	0
Jumlah		0	0

*Tagihan Penjualan
Angsuran
Rp 0,-*

Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Debitur	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	.-	0	0
2	-	0	0
3	-	0	0
Jumlah		0	0

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp 0,-*

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

31 Desember 2021

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	0	0.00%	0
Kurang Lancar	0	0.00%	0
Diragukan	0	0.00%	0
Macet	0	0.00%	0
Jumlah	0		0
Tagihan PA			
Lancar	0	0.00%	0
Kurang Lancar	0	0.00%	0
Diragukan		0.00%	0
Macet		0.00%	0
Jumlah	0		0
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0		0

Tanah

Rp379,284,415,

-

Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pengadilan Agama Banggai per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 379,284,415,- dan Rp 379,284,415,-. Kenaikan nilai aset tetap Tanah selama tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	379,284,415
Mutasi tambah:	0
Pembelian	0
Mutasi kurang:	0
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 31 Desember 2021	379,284,415

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	1909 m2	Jl. Ki Hajar Dewantara, Timbong	13,541,415
2	528 m2	Jl. Pattimura No. 32, Lompio	365,743,000
Jumlah			379,284,415

Peralatan dan
Mesin
Rp1.234.055.807,
-

Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp1.234.055.807,- dan Rp1.457.515.807,-. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	1.457.515.807
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Hibah Barang	0
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	223.460.000
Penghentian dari penggunaan	0
Saldo per 31 Desember 2021	1.234.055.807
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	922.907.487
Nilai Buku per 31 Desember 2021	311.148.320

Tidak terdapat penambahan nilai aset peralatan dan mesin pada Tahun Anggaran 2021

Gedung dan
Bangunan
Rp2.427.357.000,
-

Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp 2.427.357.000,- dan Rp 2.427.357.000,-. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	2.427.357.000
Mutasi tambah:	
Pembangunan tambahan ruang kelas	0
Mutasi kurang:	0
Saldo per 31 Desember 2021	2.427.357.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	242.018.917
Nilai Buku per 31 Desember 2021	2.185.338.083

Tidak ada Transaksi penambahan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi,
Jaringan dan
Irigasi
Rp0,-

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	0
Mutasi tambah:	
Penambahan jaringan teknologi informasi	0
Mutasi kurang:	0
Saldo per 31 Desember 2021	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	0
Nilai Buku per 31 Desember 2021	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya
Rp2.429.979,-

Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp 2.429.979,- dan Rp 2.429.979,-. Aset tetap tersebut berupa bahan perpustakaan monografi. Mutasi transaksi terhadap aset tetap lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	2.072.770
Mutasi tambah:	
-	357.209
Mutasi kurang:	0
-	0
Saldo per 31 Desember 2021	2.429.979
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	0
Nilai Buku per 31 Desember 2021	2.429.979

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp0,-

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp1.164.926.404,-
-

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp 1.164.926.404,- dan Rp 1.219.724.588,-. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan

Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	1.234.055.807	922.907.487	311.148.320
2	Gedung dan Bangunan	2.427.357.000	242.018.917	2.185.338.083
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	2.429.979	0	2.072.000
Akumulasi Penyusutan		3.663.842.786	1.164.926.404	2.498.558.403

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tak Berwujud
Rp16,850,000,-*

Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp 16,850,000,- dan Rp 16,850,000,-.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud salah satunya berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	16,850,000
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	0
Saldo per 31 Desember 2021	16,850,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(16.850.000)
Nilai Buku per 31 desember 2021	0,00

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud

Uraian	Nilai
Aplikasi SIADPA	16,850,000
Jumlah	16,850,000

Aset Lain-Lain

*Aset Lain-Lain
Rp452.711.500,-*

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp 452.711.500,- dan Rp 191.751.500,-. Aset Lain-lain erupakan

Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	191.751.500
Mutasi tambah:	
- Reklasifikasi dari aset tetap	0
Mutasi kurang:	
- Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	0
- Penghapusan BMN	0
Saldo per 31 Desember 2021	452.711.500
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	449.604.500
Nilai Buku per 31 Desember 2021	3.107.000

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp
3.107.000

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp 3.107.000,- dan Rp 5.918.800,-. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	Nilai Buku
Alat Kantor kjkljklj	0	0	0
Alat Rumah Tangga	0	0	0
Peralatan Pemancar	0	0	0
Komputer Unit	0	0	0
Peralatan Komputer	0	0	0
Jumlah	0	0	0
Aset Lain-Lain	452.711.500	(449.604.500)	3.107.000
Aset Tak Berwujud	16,850,000	(16,850,000)	0
Jumlah	469.561.500	466.454.500	3.107.000

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan

metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Uang Muka
dari KPPN
Rp25,000,000,-

Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp 25,000,000,- dan Rp 27,000,000,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp6.220.910,
-

Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp 6.220.910,- dan Rp 4.213.410,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor Pengadilan Agama Banggai per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo per 31 Desember 2020	4.213.410
Mutasi tambah:	0
Pembelian	0
Mutasi kurang:	0
Saldo per 31 Desember 2021	6.220.910
Nilai Buku per 31 desember 2021	6.220.910

Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan
Diterima Dimuka
Rp1.195.686,-

Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 1.195.686,- dan Rp 2.532.826,-. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor	0	Pendapatan Jasa Giro belum disetor ke kas negara
Potongan pajak yang belum disetor	0	Potongan pajak belanja UP belum disetor ke kas negara
Utang kepada Pihak ketiga lainnya	0	Dana yang belum dibagikan kepada yang berhak
Total	0	

*Beban Yang Masih
Harus Dibayar
Rp0,-*

Beban Yang Masih Harus Dibayar

Beban Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	0
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	0
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0	0
Jumlah	0	0

*Ekuitas
Rp2.876.493.275,-*

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 2.876.493.275,- dan Rp 3.050.494.294,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNPB

Rp 1.195.686,-

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 1.195.686,- dan Rp 2.532.826,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2021 dan TA 2020

URAIAN	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun)%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.195.686	2.532.826	(52.79)
Pendapatan Jasa Lainnya	0	0	0.00
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	0	0	0.00
Pendapatan Denda	0	0	0.00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0.00
Pendapatan PNPB	1.195.686	2.532.826	(52,79)

Pendapatan berasal dari pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan. yang berasal dari transaksi TA2021.

Beban Pegawai

Rp1.695.271.216,-

Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada TA 2021 dan TA2020 adalah masing-masing sebesar Rp 1.695.271.216,- dan Rp 1.689.457.963,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2021 dan TA 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun)%
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	1.695.271.216	1.689.457.963	2,44
Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	0.00
Beban Lembur	0	0	0.00
Beban Tunj. Khusus & Beban Pegawai Transito	0	0	0.00
Jumlah	1.695.271.216	1.689.457.963	2,44

Beban Persediaan

Rp14.902.500,-

Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada TA 2021 dan TA

2020 adalah masing-masing sebesar Rp 14.902.500,- dan Rp 22.775.000,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk TA 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2021 dan TA 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun)%
Beban Persediaan konsumsi	14.902.500	22.775.000	(34,56)
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	0	0	0.00
Beban Persediaan bahan baku	0	0	0.00
Beban Persediaan barang hasil sitaan	0	0	0.00
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0.00
Jumlah	14.902.500	22.775.000	(34,56)

Beban Barang dan
Jasa Rp 553.162.712
,-

Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 553.162.712,- dan Rp 481.155.353,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Kenaikan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya beban sewa rumah dinas hakim pada TA 2021. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk TA 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2021 dan TA 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun)%
Beban Barang Operasional	553.162.712	481.155.353	14,96
Beban Barang Non Operasional	0	0	0.00
Beban Langganan Daya dan Jasa	0	0	0,00
Beban Jasa Pos dan Giro	0	0	0.00
Beban Jasa Konsultan	0	0	0.00
Beban Sewa	0	0	100
Beban Jasa Profesi	0	0	0.00
Beban Jasa Lainnya	0	0	0.00
Beban Aset Ekstrakomtabel	0	0	0.00
Jumlah	553.162.712	481.155.353	14,96

Beban
Pemeliharaan
Rp181.961.057,
-

Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 181.961.057,- dan Rp 174.890.911,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya kenaikan pada pemeliharaan peralatan dan mesin pada kendaraan roda empat. Rincian beban pemeliharaan untuk TA 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2021 dan TA 2020

Beban Jasa Pos dan Giro	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun)%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	113.488.000	0	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	62.336.057	0	0
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan lainnya	6.137.000	0	0
Beban Aset Ekstrakomtabel	0	0	0.00
Jumlah	181.961.057	174.890.911	0

Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan
Dinas
Rp75.100.000,-

Beban Perjalanan Dinas TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 75.100.000,- dan Rp 0,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Penurunan beban perjalanan dinas disebabkan oleh berkurangnya frekuensi rapat koordinasi yang disebabkan oleh pandemic19. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk TA 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2021 dan TA 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun)%
Beban Perjalanan Biasa	75.100.000	103.214.242	(27,23)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	0.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	0.00
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	0	0	0.00
Jumlah	75.100.000	103.214.242	(27,23)

Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada Masyarakat
Rp0,-

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2021

Dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk TA 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
TA 2021 dan TA 2020*

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun)%
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0.00
Beban Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0.00
Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0.00
Jumlah	0	0	0.00

*Beban Bantuan
Sosial Rp0,-*

Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk TA 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2021 dan TA 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun)%
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0.00
Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial	0	0	0.00
Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan	0	0	0.00
Jumlah	0	0	0.00

Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp208.973.616,-*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 208.973.616,- dan Rp 203.990.005,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan

(depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan
Amortisasi TA 2021 dan TA 2020*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	208.973.616	203.990.005	2,44
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Jumlah Penyusutan	208.973.616	203.990.005	2,44
Beban Amortisasi Aset Lainnya	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0	0	0
Jumlah Amortisasi	0	0	0
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	208.973.616	203.990.005	2,44

*Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0,-*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk TA 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
TA 2021 dan TA 2020*

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Pajak	0	0	0.00
Beban Penyisihan Piutang Bukan Pajak	0	0	0.00
Beban Penyisihan Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	0	0	0.00
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang	0	0	0.00
Jumlah	0	0	0.00

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional Rp0,-

Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional TA 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2021 dan TA 2020

URAIAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	0	0	0.00
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I	0	0	0.00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0.00
Beban Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0.00
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0	0	0.00
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	0	0	0.00
Jumlah	0	0	(100.00)

*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)

Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa
Rp0,-

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk TA 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa TA 2021 dan TA 2020

URAIAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Luar Biasa	0	0	0.00
Beban Keperluan Mendesak/Tak Terduga	0	0	0.00
Beban Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	0	0	0.00
Jumlah	0	0	0.00

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp3.050.494.294,

-

Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 3.050.494.294,- dan Rp 2.223.601.387,-.

Defisit LO

Rp(2.728.175.415

),-

Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada TA 2021 dan TA 2020 adalah sebesar Rp (2.728.175.415),- dan Rp (2.672.950.648),-. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai

Aset

Rp0,-

Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada TA 2021 dan TA 2020 adalah sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan Rp0,-

Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah/(kurang) atas nilai persediaan untuk TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk TA 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Jumlah	0

Selisih Revaluasi Aset

Tetap Rp0,-

Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 722.342.000,-.

Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi Rp0,-

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada TA 2021 dan TA 2020 adalah sebesar Rp 0,- dan Rp (37.858.588),-. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi TA 2021

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	0
Gedung dan Bangunan	0
Jumlah	0

Koreksi Lain-Lain
Rp0,-

Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada TA 2021 dan TA 2020 adalah sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi Hibah	0
Jumlah	0

Transaksi Antar
Entitas
Rp2.554.174.396,
-

Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 2.554.174.396,- dan Rp 2.815.360.143,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan dari Entitas Lain	2.555.012.873
Diterima dari Entitas Lain	(1.195.686)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	357.209
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	2.554.174.396

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga TA 2021, DDEL sebesar Rp 2.555.012.873,- sedangkan DKEL sebesar Rp (1.195.686).

Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 Rp 375.209,- terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	-	-	0
3	-	-	0
	Jumlah		0

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,-.

Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,-, dari total Rp 0,- yang diterima sepanjang 2021.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas

pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp 0,- dan Rp 0,-.

Rincian pengesahan Hibah untuk periode 31 Desember 2021 sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	-	-	0
2	-	-	0
Total Pengesahan			0
Pengesahan Pengembalian Hibah			0
Jumlah			0

Rincian Penerimaan Hibah Langsung TA 2021 disajikan pada lampiran.

Ekuitas Akhir

Rp2.876.493.275,

-

Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing- masing sebesar Rp 2.876.493.275,- dan Rp 3.050.494.294,-

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA.

KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini yaitu belum lengkapnya progres Laporan Hasil Inventirisasi Penilaian Kembali Aset (LHIP) pada KPKNL, apabila ada koreksi nilai aset nantinya akan mempengaruhi nilai aset.

PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran maka pada Pengadilan Agama Banggai pada tanggal 02 Januari 2020 telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan,

Semula:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Mohammad Mussyafah, S. H.I
Pejabat Pembuat Komitmen	: Mohammad Mussyafah, S. H.I
Pejabat Penandatangan/ Penguji SPM	: Syahrani Rahmawati Tiloli, S.H.
Bendahara	: Pahlawanto S.IP

Menjadi:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Sabrin, S. Ag
Pejabat Pembuat Komitmen	: Sabrin, S. Ag
Pejabat Penandatangan /Penguji SPM	: Pahlawanto S.IP
Bendahara	: Pahlawanto S.IP